

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

CODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

TALAMAN: 14

TAHUN 2004

WHO Tak Berani Temui Warga Buyat

Yang merekomendasikan Newmont beroperasi di Buyat harus bertanggung jawab.

JAKARTA — Belasan warga Teluk Buyat, Kabupaten Minahasa, kemarin memenuhi ruang tunggu kantor Badan Kesehatan Dunia (WHO) di gedung Bina Mulia, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka datang untuk mendapatkan kejelasan tentang sikap WHO terhadap kasus Buyat.

Mereka menunggu sekitar satu jam lamanya untuk bertemu dengan pejabat berwenang WHO. Namun, tak satu pun yang berkenan menemui warga korban pencemaran logam berat yang diduga berasal dari perusa-

haan pertambangan PT Newmont Minahasa Raya.

Hanya N. Kholik, petugas keamanan gedung, yang menyambut kedatangan warga. "Pihak WHO tidak berani bertemu karena bukan wewenang mereka," kata Kholik kepada pendiri LBH Kesehatan, Iskandar Sitorus, yang mendampingi para warga Buyat.

Warga tak dapat menyembunyikan perasaan kecewanya atas sikap WHO. Padahal, kedatangan mereka untuk sesuatu yang dianggap penting, yakni ingin mendapat penjelasan tentang data atau informasi berkaitan dengan kerja sama WHO dan Departemen Kesehatan untuk kasus Buyat. "Kami melihat ada sikap yang tidak terbuka dari WHO terhadap kasus Buyat ini," kata Iskandar.

Bisa saja, kata dia, pejabat WHO berwenang tidak di tem-

pat, namun kata Iskandar, "Ada data-data yang terkait di kantor (WHO), dan kami meminta itu dalam surat ini." Hingga jam menunjuk pukul 11.00 WIB, tak ada respons dari pihak WHO. Akhirnya, warga menitipkan surat yang berisi permintaan penjelasan soal kasus Buyat tersebut kepada Kholik.

Surtini Papatungan, seorang warga menjelaskan kepada wartawan, mereka berharap mendapat data dari WHO. Data WHO tentang kasus Buyat tersebut digunakan warga untuk menambah bukti-bukti dalam upaya perlawanan hukum yang akan dilakukan.

Di tempat terpisah, Rizal Max Rompas, guru besar dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Manado, mengatakan, yang terpenting

sekarang adalah mencari penyebab dari penyakit-penyakit aneh di Teluk Buyat.

Rizal yang pernah terlibat dalam penelitian independen pada 1994 di teluk itu menemukan kadar arsen dalam tubuh ikan sebesar 0,02 pbb. Tiga tahun kemudian (1997), terjadi retakan saluran pipa tailing ke laut dan mengakibatkan bahan yang tercemar naik ke permukaan. Setahun kemudian kadar pencemaran meningkat menjadi 0,1 pbb.

Tapi Newmont, kata Rizal, mengatakan hal itu tidak apa-apa dan tidak membahayakan. Namun, berdasarkan pantauan dirinya, kandungan merkuri di perairan itu dan di dalam tubuh ikan cenderung meningkat. Terbukti, dari hasil penelitian Rizal pada 1999 menunjukkan kadar arsen meningkat hingga melewati am-

bang batas normal. Tapi, Newmont kembali menyangkalnya.

Bagi Rizal, kesalahan tidak sepenuhnya ada pada Newmont. Para petugas yang mengeluarkan analisis dampak lingkungan (amdal) dan yang merekomendasikan Newmont beroperasi di Buyat harus bertanggung jawab. "Karena tanpa ada persetujuan amdal, Newmont tidak mungkin melakukan operasi pertambangan," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Sementara itu, sikap berhati-hati ditunjukkan anggota DPR menanggapi kasus Buyat. Ketua Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR, Ahmad Sanusi Tambunan, mengatakan bahwa Dewan tidak mau memperkeruh masalah dengan mengeluarkan tanggapan.

Sanusi menjelaskan, kepastian adanya pencemaran logam berat di Teluk Buyat yang mengarah pada terjadinya minamata harus lewat uji laboratorium. "Pengujian itu harus sama persis dengan yang dilakukan di Jepang, baik dari prosedur maupun kriteria penyakitnya," katanya kepada *Tempo News Room* di gedung DPR kemarin.

Namun, dia mengakui Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan sendiri belum pernah turun ke lokasi untuk melihat situasi di Teluk Buyat. Sanusi beralasan, volume kerja Dewan sangat banyak. "Ada 5 RUU yang sedang kami bahas. Bukannya kami tidak mau memperhatikan masyarakat, tapi ini kelihatannya masalah limbah ada di Komisi VIII (Lingkungan), walau dampak kesehatannya ada di kami," katanya. ● rr ariyani-tnr